

ANALISIS PRIORITAS PERJALANAN DINAS DENGAN PIRAMIDA URGENSI PERJALANAN DINAS PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEPELABUHANAN

BOOK CHAPTER

OLEH:

**FIRDA LUZCYANA
DANAR IRIANTO, SE.,M.ACC., AK**



**LAPORAN STUDI
D3 AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BATAM
2025/2026**

BAB I

PENDAHULUAN

Perjalanan dinas merupakan salah satu kegiatan operasional penting dalam instansi pemerintah sebagai pendukung pelaksanaan tugas yang efisien, tak lain dalam inisiatif memperkuat hubungan koordinatif antarinstansi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta representasi lembaga, yang kemudian biaya pengeluarannya akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai melalui APBN, sudah seharusnya didukung dengan pengelolaan administrasi yang tertib dan sistematis sebagai bentuk dari akuntabilitas keuangan negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan berupa menumpuknya dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang belum terselesaikan secara administratif pada beberapa unit kerja, salah satunya Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan.

Permasalahan berupa menumpuknya dokumen SPPD, terlihat jelas dalam dinamika sehari-hari di Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan, yang disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan antara volume pelaksanaan perjalanan dinas dengan kapasitas pengelolaan administrasinya di bagian Bendahara Pengeluaran. Seluruh agenda perjalanan dinas cenderung diperlakukan dengan tingkat kepentingan yang sama, tanpa mempertimbangkan urgensi, maupun dampak terhadap kinerja. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi pembayaran berjalan kurang optimal, bahkan berpotensi menimbulkan keterlambatan *reimbursement* dan menumpuknya akumulasi kewajiban.

Kurangnya pengendalian terhadap prioritas perjalanan dinas berpotensi menjadi sebab timbulnya ketidakteraturan dalam pengelolaan administrasi. Kondisi ini ditunjukkan oleh menumpuknya dokumen SPPD yang belum terselesaikan serta meningkatnya volume dokumen yang harus diproses dalam waktu yang bersamaan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas tata kelola administrasi dan menghambat efektivitas pelaporan keuangan instansi. Selain itu, dengan tidak adanya mekanisme prioritas yang jelas menyebabkan seluruh kegiatan

diperlakukan dengan tingkat kepentingan yang sama, sehingga pelaksanaan perjalanan dinas menjadi kurang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukannya suatu pendekatan yang mampu mengklasifikasikan dan memprioritaskan agenda perjalanan dinas secara lebih sistematis. Dalam analisis ini, pendekatan tersebut diwujudkan melalui penyusunan Piramida Urgensi Perjalanan Dinas, yang diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam menentukan prioritas kegiatan, serta meminimalisir penumpukan dokumen SPPD di bagian Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan. Melalui analisis perjalanan dinas dari Januari hingga Desember tahun 2025 di Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan, studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran prioritas pada perjalanan dinas yang lebih objektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat/pegawai lainnya atas perintah pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, yang biayanya dibebankan pada APBN (Kementrian Keuangan RI, 2023). Perjalanan dinas berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan tugas pemerintah yang efisien, yang juga memperkuat hubungan koordinatif antarinstansi, dan meningkatkan kapasitas aparatur melalui kegiatan lapangan, pelatihan serta representasi lembaga. Oleh karena itu, perjalanan dinas merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

2. Kerangka Perjalanan Dinas dalam Tata Kelola Pemerintah

Secara umum, kerangka perjalanan dinas mencakup beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan merupakan tahap yang berperan penting dalam menentukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari perjalanan yang diajukan, serta mengulik tujuan dan urgensi perjalanan tersebut. Menurut Raharjo et al. (2024), sistem pengendalian yang efektif berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan serta menjaga proses pengeluaran anggaran agar dilakukan sesuai regulasi. Dalam konteks perjalanan dinas, sistem pengendalian dapat diterapkan untuk memeriksa dokumen SPPD, mulai dari kelengkapan hingga tujuan dari agenda perjalanan, sehingga perjalanan dinas memiliki instrumen pengukur skala urgensi yang terjadi pada instansi.

3. Analisis Skala Urgensi Perjalanan Dinas

Penentuan skala urgensi dalam kegiatan organisasi tidak lepas dari proses pengambilan keputusan yang efektif. Jmari et al (2025) menyatakan bahwa sistem informasi dan mekanisme kontrol manajemen berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memastikan pencapaian tujuan organisasi. Sistem informasi berperan dalam memfasilitasi pengelolaan data serta mendukung pengambilan keputusan secara ringkas dan akurat, sementara kontrol manajemen berfungsi sebagai alat untuk memantau pencapaian tujuan organisasi. Demikian, dengan perpaduan sistem informasi dan kontrol manajemen, organisasi dapat menilai urgensi perjalanan dinas secara sistematis dan dapat menghindari duplikasi kegiatan.

4. Indikator Prioritas dalam Penentu Kegiatan

Wijaya dan Imbar (2021) menyatakan bahwa penentuan prioritas berfungsi sebagai acuan dalam menentukan tingkat kepentingan suatu kegiatan atau program dalam organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan

prioritas diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang lebih penting dibandingkan kegiatan lainnya. Melalui indikator prioritas, organisasi dapat menentukan urutan pelaksanaan kegiatan secara lebih sistematis dan terstruktur, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Indikator prioritas untuk penentuan urgensi perjalanan dinas akan menggunakan pendekatan berbasis manajemen risiko yang mengacu pada *International Organization for Standardization 31000* (2018). Standar ini menekankan bahwa manajemen risiko mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan ketidakpastian. *ISO 31000* juga menekankan pentingnya pemilihan alternatif tindakan dan mempertimbangkan faktor waktu (*time-related factors*) dalam analisis risiko. Oleh karena itu, konsep dalam standar ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun indikator penentuan urgensi perjalanan dinas, yang meliputi relevansi kegiatan terhadap instansi, kontribusi terhadap kinerja, urgensi waktu pelaksanaan, risiko apabila kegiatan tidak dilaksanakan, serta ketersediaan alternatif pelaksanaan. Dengan pendekatan ini, penentuan prioritas kegiatan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur.

5. Model Piramida Urgensi Perjalanan Dinas (*Pyramid of Travel Necessity*)

Model Piramida Urgensi Perjalanan Dinas merupakan konsep skala urgensi perjalanan dinas yang mengadaptasi pendekatan teori *Hierarchy of Needs* yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 melalui artikelnya berjudul *A Theory of Human Motivation*. Menurut Maslow (dalam Mustofa, 2022), kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis, dimulai dari kebutuhan dasar hingga mencapai aktualisasi diri. Prinsip ini dapat diimplementasikan dalam konteks manajemen sektor publik, khususnya dalam proses penetapan prioritas kegiatan perjalanan dinas berdasarkan urgensi dan relevansinya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Melalui pendekatan ini,

perjalanan dinas pada Direktorat pengelolaan Kepelabuhanan dapat dianalisis telah sejalan dengan prioritas organisasi atau justru menunjukkan kecenderungan yang tidak efisien.

BAB III

PEMBAHASAN

Analisis urgensi perjalanan dinas dilakukan untuk menilai tingkat prioritas setiap agenda perjalanan dinas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan. Penentuan tingkat urgensi menggunakan pendekatan indikator prioritas yang mengacu pada Wijaya dan Imbar (2021) serta pendekatan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018. Menurut Wijaya dan Imbar (2021), indikator prioritas digunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat kepentingan suatu kegiatan, sedangkan ISO 31000:2018 menekankan pentingnya pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, risiko, faktor waktu, dan alternatif tindakan yang tersedia.

Analisis dilakukan melalui observasi terhadap dokumen SPPD pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan periode Januari hingga Desember 2025. Setiap agenda perjalanan dinas dievaluasi berdasarkan lima indikator, yaitu relevansi kegiatan terhadap instansi, kontribusi terhadap kinerja, urgensi waktu pelaksanaan, risiko apabila kegiatan tidak dilaksanakan, dan ketersediaan alternatif pelaksanaan. Kelima indikator tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan agenda perjalanan dinas ke dalam tiga tingkat urgensi yang disusun melalui Model Piramida Urgensi Perjalanan Dinas. Adapun indikator yang digunakan dalam proses analisis disajikan pada Tabel 1 berikut.

Table 1. Indikator Penetapan Tingkat Urgensi Perjalanan Dinas

Indikator	Kategori		
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Relevan Fungsi Kegiatan pada Instansi	Sangat relevan dengan tugas pokok dan fungsi	Cukup relevan	Kurang relevan

Kontribusi Kegiatan Terhadap Kinerja	Berdampak langsung dan signifikan	Berdampak tidak langsung	Dampak minimal
Urgensi waktu pelaksanaan	Mendesak (tidak dapat ditunda)	Penting namun masih dapat ditunda	Tidak mendesak
Resiko Apabila Agenda Tidak Dijalankan	Risiko tinggi	Risiko sedang	Risiko rendah
Ketersediaan Alternatif Pelaksanaan	Tidak ada alternatif	Alternatif terbatas	Alternatif tersedia

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Wijaya dan Imbar (2021) dan ISO 31000:2018.

Berdasarkan data dokumen SPPD pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dari Januari hingga Desember tahun 2025 yang telah diobservasi, terdapat 89 perjalanan dinas yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan indikator pada Tabel 1. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa tidak seluruh agenda perjalanan dinas memiliki tingkat prioritas yang sama dalam pelaksanaannya. Untuk memberikan gambaran penerapan indikator tersebut, berikut disajikan contoh analisis pada masing-masing tingkat urgensi.

Table 2. Contoh Analisis Perjalanan Dinas dengan Tingkat 1

Agenda:	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian					
Indikator	Kategori			Urgensi		
	1	2	3			
Relevan Fungsi Kegiatan pada Instansi	√			Tingkat 1		
Kontribusi Kegiatan Terhadap Kinerja	√					

Urgensi Waktu Pelaksanaan	√			Mendesak, tak ada alternatif
Resiko Apabila Agenda Tidak Dijalankan	√			
Ketersediaan Alternatif Pelaksanaan	√			

Table 3. Contoh Analisis Perjalanan Dinas dengan Tingkat 2

Agenda:	Undangan Sosialisasi langkah-langkah penyelesaian pembayaran akhir tahun 2025			
Indikator	Kategori			Urgensi
	1	2	3	
Relevan Fungsi Kegiatan pada Instansi	√			Tingkat 2
Kontribusi Kegiatan Terhadap Kinerja	√			
Urgensi Waktu Pelaksanaan		√		
Resiko Apabila Agenda Tidak Dijalankan		√		Penting, namun tidak mendesak
Ketersediaan Alternatif Pelaksanaan		√		

Table 4. Contoh Analisis Perjalanan Dinas dengan Tingkat 3

Agenda	Menghadiri undangan sebagai Narasumber Alumni dalam acara kegiatan Awal Perkuliahan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025-2026 (<i>Engineering Day</i>)
--------	--

Indikator	Kategori			Urgensi
	1	2	3	
Relevan Fungsi Kegiatan pada Instansi			√	Tingkat 3
Kontribusi Kegiatan Terhadap Kinerja			√	
Urgensi Waktu Pelaksanaan			√	
Resiko Apabila Agenda Tidak Dijalankan			√	Dapat dijadwalkan ulang dan dialihkan daring
Ketersediaan Alternatif Pelaksanaan			√	

Hasil analisis kemudian dikelompokkan ke dalam tiga tingkat urgensi yang disusun melalui Model Piramida Urgensi Perjalanan Dinas yang mengadaptasi konsep hierarki kebutuhan Maslow (1943). Pengelompokan ini dilakukan untuk menggambarkan perbedaan tingkat prioritas setiap agenda perjalanan dinas berdasarkan relevansi kegiatan, kontribusi terhadap kinerja, urgensi waktu pelaksanaan, risiko apabila kegiatan tidak dilaksanakan, dan ketersediaan alternatif pelaksanaan. Hasil klasifikasi tersebut disajikan pada Tabel 5.

Table 5. Hasil Analisis Tingkat Urgensi Perjalanan Dinas Januari hingga Desember 2025 Pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Tingkat Urgensi	Jumlah	Aspek Perjalanan
Tingkat 1	31	Aspek Hukum dan Regulasi
		Keamanan Pelabuhan
		Pengelolaan Anggaran
		Kerjasama Strategis

Tingkat 2	48	Peningkatan Kapasitas SDM
		Penguatan Sistem Pengendalian
		Penyempurnaan Tata Kelola Instansi
Tingkat 3	10	Representatif
		Seremonial
		Promosi
		Pengembangan Budaya Intansi

Sumber: Data SPPD Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan Tahun 2025, diolah oleh penulis berdasarkan Wijaya dan Imbar, ISO 31000:2018, dan konsep hierarki kebutuhan Maslow (1943).

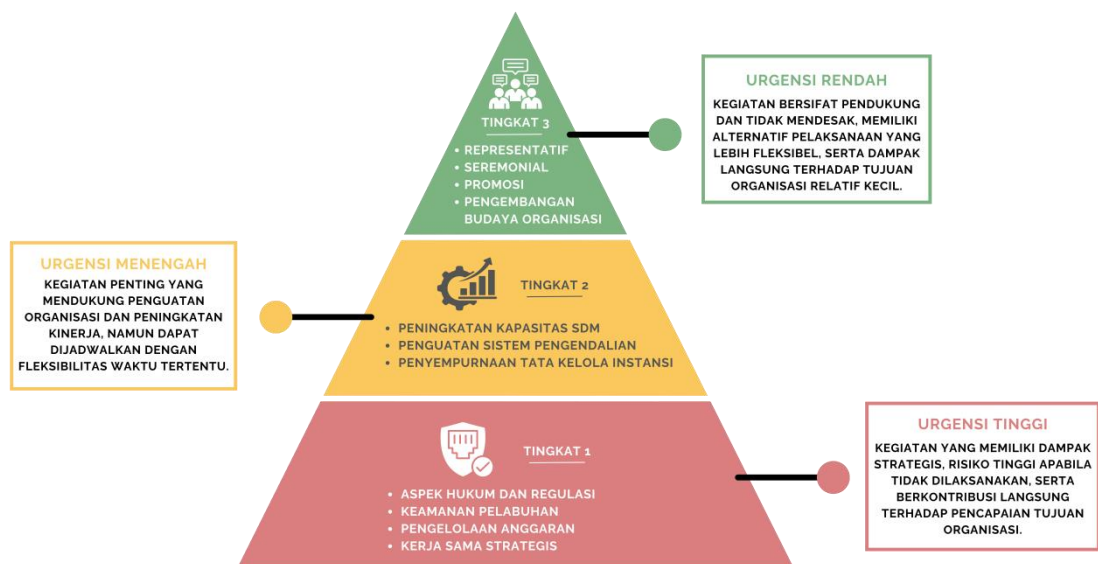
Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa tingkat urgensi perjalanan dinas tidak bersifat seragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat relevansi kegiatan terhadap tugas dan fungsi instansi, kontribusinya terhadap kinerja organisasi, urgensi waktu pelaksanaan, risiko apabila kegiatan tidak dilaksanakan, serta ketersediaan alternatif pelaksanaan. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh perjalanan dinas memerlukan prioritas yang sama dalam pelaksanaannya.

Perjalanan yang diklasifikasikan sebagai Tingkat 1 adalah agenda dengan urgensi tinggi yang umumnya berimplikasi langsung terhadap aspek hukum, regulasi keamanan Pelabuhan, pengelolaan anggaran, serta kerja sama strategis. Agenda ini berdampak langsung terhadap stabilitas operasional instansi, bersifat mendesak, dan terbatasnya alternatif pelaksanaan, sehingga memerlukan prioritas utama dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Agenda pada Tingkat 2, atau perjalanan dengan urgensi menengah, didominasi dengan agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan sistem pengendalian, serta penyempurnaan tata kelola instansi. Pada tingkat ini agenda perjalanan memiliki dampak signifikan, walau begitu diklasifikasikan sebagai urgensi

menengah sebab kegiatan tersebut tidak selalu bersifat mendesak dan masih berkemungkinan untuk menyesuaikan kembali waktu pelaksanaan.

Sementara itu, agenda pada Tingkat 3, urgensi rendah, mencakupi kegiatan yang bersifat representatif, seremonial, promosi, serta pengembangan budaya instansi. Kegiatan dalam klasifikasi ini tidak berdampak langsung pada instansi, dan juga umumnya memiliki alternatif pelaksanaan yang memadai seperti daring ataupun penyampaian materi secara digital.



Gambar 1 Model Piramida Urgensi Perjalanan Dinas pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan.

Berdasarkan hasil tersebut, penerapan analisis skala urgensi perjalanan dinas dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan prioritas kegiatan secara lebih sistematis dan objektif. Selain mendukung pengambilan keputusan, pendekatan ini juga berpotensi membantu instansi dalam mengoptimalkan pengelolaan administrasi perjalanan dinas sehingga dapat meminimalkan penumpukan dokumen SPPD.

BAB IV

KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan menunjukkan bahwa setiap agenda perjalanan dinas memiliki tingkat urgensi yang berbeda sesuai dengan tujuan, dampak, dan kebutuhan pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh perjalanan dinas perlu memperoleh prioritas yang sama dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Namun demikian, belum adanya mekanisme yang secara khusus mengelompokkan tingkat urgensi perjalanan dinas menyebabkan seluruh kegiatan cenderung diperlakukan setara, sehingga berpotensi meningkatkan beban administrasi dan memicu penumpukan dokumen SPPD pada bagian Bendahara Pengeluaran.

Analisis yang dilakukan melalui Model Piramida Urgensi Perjalanan Dinas menghasilkan klasifikasi terhadap 89 agenda perjalanan dinas yang dilaksanakan selama periode Januari hingga Desember 2025. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa 31 agenda termasuk dalam Tingkat 1 (urgensi tinggi), 48 agenda berada pada Tingkat 2 (urgensi menengah), dan 10 agenda termasuk dalam Tingkat 3 (urgensi rendah). Agenda dengan urgensi tinggi umumnya berkaitan dengan aspek hukum dan regulasi, keamanan pelabuhan, pengelolaan anggaran, serta kerja sama strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Sementara itu, agenda peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem pengendalian, dan penyempurnaan tata kelola instansi berada pada tingkat urgensi menengah. Kegiatan yang bersifat representatif, seremonial, promosi, dan pengembangan budaya organisasi dikategorikan sebagai urgensi rendah karena memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaannya.

Penerapan Model Piramida Urgensi Perjalanan Dinas memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai prioritas kegiatan berdasarkan relevansi, kontribusi terhadap kinerja, urgensi waktu, risiko, serta ketersediaan alternatif pelaksanaan. Dengan adanya klasifikasi tersebut, instansi dapat memiliki dasar pertimbangan yang

lebih objektif dalam menentukan prioritas perjalanan dinas sehingga pengelolaan administrasi dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- British Standards Institution. (2018). *BS ISO 31000:2018 risk management—Guidelines*. BSI.
- Jmari, S., Oubdi, K., & Khaddouj, K. (2025). Optimisation of governance in public institutions: The catalytic potential of information systems and management control. *International Journal of Data Analysis and Management*, 4(1), 45–57. <https://ojs.nmdjournals.org/index.php/ijdam/article/view/149>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Lampiran I: Peraturan tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai lainnya*. Kementerian Keuangan RI.
- Mustofa, A. Z. (2022). Hierarchy of human needs: A humanistic psychology approach of Abraham Maslow. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 3(2), 30–35.
- Raharjo, A., Sarjito, & Duarte, A. (2024). Implementation of the internal control system in increasing the accountability of the financial reports. *Formosa Journal of Social Sciences*, 3(2), 115–126. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjss/article/view/12924>
- Wijaya, W. A., & Imbar, R. V. (2021). Analisis indikator prioritas pada smart library dengan menggunakan metode analytic hierarchy process. *Jurnal Strategi*, 3(2), 421–433.